

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sidoarjo

1.1 Administrasi Wilayah

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,243 Km² dan luas wilayah lautan 4 mil kearah laut adalah sebesar 201,6868 Km².

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas
Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas wilayah (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Sidoarjo	10	14	6256,0
2	Buduran	15	-	4102,5
3	Candi	24	-	4066,8
4	Porong	13	-	2982,3
5	Krembung	19	-	29,550
6	Tulangan	22	-	3120,5
7	Tanggulangin	19	-	3229,0
8	Jabon	15	-	8099,8
9	Krian	19	3	3250,0
10	Balombendo	20	-	3140,0
11	Wonoayu	23	-	3392,0
12	Tarik	20	-	3606,0
13	Prambon	20	-	3422,5
14	Taman	16	8	3153,5
15	Waru	17	-	3032,0
16	Gedangan	15	-	2405,8
17	Sedati	16	-	7943,0
18	Sukodono	19	-	3267,8
Total		322	31	71.424,3

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2012

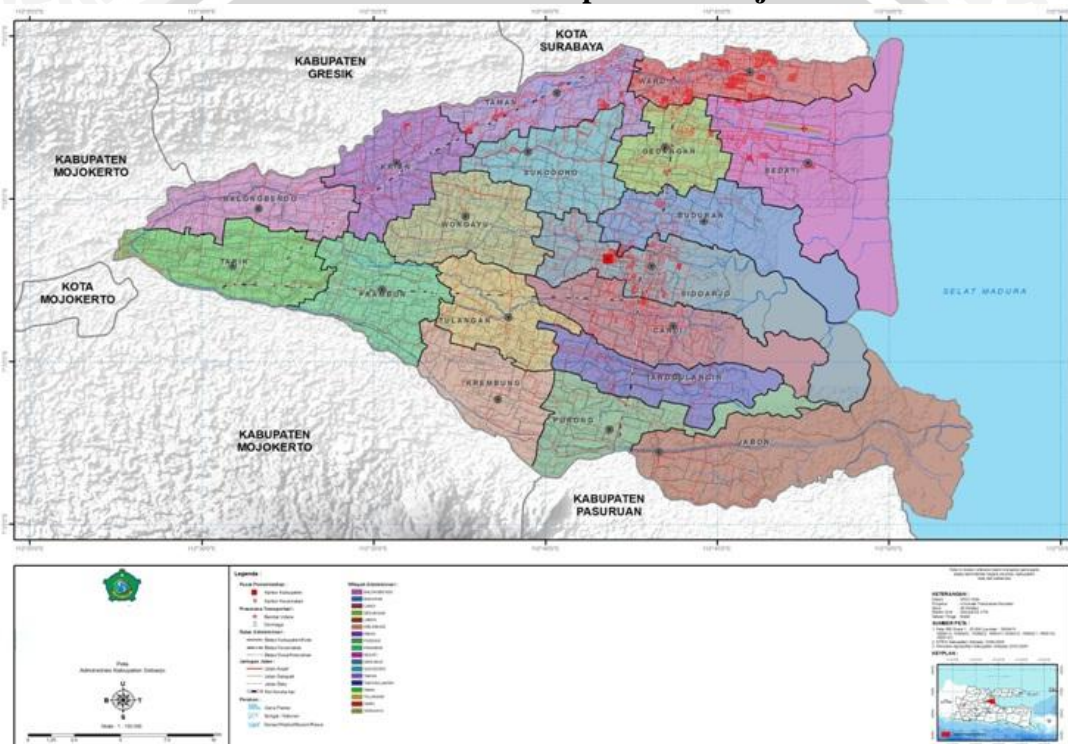
1.2 Pemanfaatan Ruang

1.2.1 Penggunaan Lahan dan Kecenderungannya

Penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dengan luas 71.424,3 Ha, terdiri atas penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung meliputi penggunaan lahan untuk sempadan pantai, sempadan sungai, cagar alam, taman wisata alam, cagar budaya, dan kawasan hutan bakau. Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya meliputi permukiman, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan konservasi bangunan sejarah.

Penggunaan lahan untuk kawasan lindung berupa sempadan sungai terdapat pada Sungai Magetan, Sungai Porong, Kali Butung, Sungai Brantas, dan Sungai Mas. Sedangkan penggunaan lahan untuk perlindungan hutan bakau terdapat di pantai Timur Sidoarjo, dengan luas 1.038,25 Ha.

Gambar 3
Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan budidaya, yaitu mencapai 67.384,55 Ha, atau sekitar 94,34% dari luas wilayah keseluruhan, dengan klasifikasi penggunaan lahan berupa permukiman, industri, pertambangan, pertanian, perikanan, tanah kosong, jalan dan sungai/saluran. Untuk mengetahui lebih jelas penggunaan lahan budidaya di Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Penggunaan Lahan Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Permukiman (Ha)	Industri (Ha)	Pertambangan (Ha)	Pertanian (Ha)	Perikanan (Ha)	Tanah Kosong (Ha)	Jalan (Ha)	Sungai/ Saluran Air
Sidoarjo	1.698,47	46,15	-	683,93	3.088,22	131,90	119,99	283,16
Buduran	764,63	134,46	-	1.053,41	1.731,16	1,00	51,91	117,44
Candi	1.130,77	63,75	-	1.302,81	1.031,66	85,59	73,09	191,64
Porong	845,37	24,63	5,09	1.287,24	496,32	25,71	88,80	177,33
Krembung	712,81	14,21	3,49	1.855,23	-	-	26,62	140,14
Tulangan	877,98	12,12	-	1.980,11	-	-	41,81	131,08
Tanggulgin	790,28	36,43	4,90	1.522,05	498,96	12,24	89,54	139,42
Jabon	423,73	0,40	18,36	1.826,22	4.077,51	53,17	36,13	798,23
Krian	915,77	213,78	-	1.795,09	-	11,00	106,49	136,81
Balombendo	737,21	49,25	-	1.933,84	-	10,88	62,20	169,45
Wonoayu	926,23	42,71	-	2.168,37	-	24,96	44,63	134,44
Tarik	829,53	171,17	-	2.077,69	-	12,60	60,80	231,01
Prambon	841,71	26,05	-	2.159,01	-	-	25,09	177,96
Taman	1.355,69	477,09	0,24	992,88	2,59	33,11	114,96	141,48
Waru	1.290,06	273,07	-	156,43	497,06	285,47	6,72	126,13
Gedangan	766,40	256,35	-	1.036,48	-	94,05	65,05	81,93
Sedati	1.718,66	27,58	-	864,35	4.206,89	61,82	28,49	225,63
Sukodono	1.014,25	35,56	-	1.901,85	-	38,10	91,49	101,81
TOTAL	17.639,55	1.901,76	32,08	26.596,99	15.630,37	881,60	1.197,11	3.505,09

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar Kabupaten Sidoarjo adalah pertanian yang luasnya mencapai 26.596,99 Ha, atau sekitar 37,24% dari luas wilayah keseluruhan. Pertanian tersebut terdiri dari pertanian lahan sawah, dan pertanian tanaman kering. Tingginya penggunaan lahan pertanian tersebut disebabkan Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang sangat subur tanahnya. Distribusi penggunaan lahan untuk pertanian terbesar berada di Kecamatan Wonoayu, Prambon, dan Kecamatan Tarik, dengan luas masing-masing yaitu 2.168,37 Ha, 2.159,01 Ha, dan 2.077,69 Ha.

Penggunaan lahan budidaya terbesar kedua setelah pertanian adalah permukiman dengan luas 17.639,55 Ha atau sekitar 24,69% dari luas keseluruhan. Perkembangan permukiman di Kabupaten Sidoarjo terjadi tidak merata, beberapa

kawasan tumbuh relatif cepat sedangkan kawasan lainnya relatif lambat. Pertumbuhan permukiman yang terjadi dengan cepat antara lain berada di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati, sebagai akibat dari adanya kegiatan industri dan Bandara Juanda.

Selain aktivitas pertanian sawah dan tanaman kering, juga terdapat perkebunan dengan komoditi unggulannya adalah tanaman tebu. Perkebunan tebu pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan lahan sawah untuk setiap musim yang diatur dengan sistem glebakan pada tanah sawah. Penggunaan lahan lain yang cukup dominan adalah budidaya perikanan dengan luas 15.630,37 Ha. Kegiatan budidaya perikanan yang ada meliputi perikanan tambak, perikanan kolam, keramba dan mina padi, dengan hasil produksi unggulannya berupa bandeng dan udang. Wilayah tambak Sidoarjo membentang dari Kecamatan Waru sampai Kecamatan Jabon, di mana kecamatan-kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Madura.

Aktivitas ekonomi sektor industri juga memanfaatkan lahan yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo, yaitu seluas 1.901,76 Ha, dimana lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan. Lokasi industri yang berupa kawasan/mengelompok terdapat pada Kawasan industri Berbek dan kawasan industri Tambak Sawah di Kecamatan Waru, kawasan industri di Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Jabon. Sedangkan aktivitas industri non kawasan lokasinya tersebar di setiap Kecamatan. Untuk Industri kecil non formal/kerajinan rakyat, lokasinya paling banyak terdapat di Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Sidoarjo.

Penggunaan lahan untuk infrastruktur transportasi berupa jalan di Kabupaten Sidoarjo cukup banyak (1,68% dari luas keseluruhan Kab. Sidoarjo), meliputi jalan raya serta jaringan jalan rel kereta api. Jalan raya meliputi jalan tol, jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder serta jalan lokal. Jalan tol yang ada adalah tol Waru-Sidoarjo-Gempol yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Pasuruan (akses penghubung dengan wilayah timur). Sedangkan jalan arteri primer terdiri dari dua ruas jalan yaitu arah Utara – Selatan (menghubungkan Kota Surabaya – Kabupaten Pasuruan) dan arah Utara – Barat (menghubungkan Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto), serta terdapat juga By pass Krian-Balongsendo.

Jaringan jalan rel Kereta api yaitu rel K.A yang melintasi Kecamatan Tarik-Balongsendo-Krian-Taman, dan jalan rel K.A yang melintasi Kecamatan Waru-Gedangan-Buduran-Sidoarjo-Candi-Tanggulangin-Porong.

Untuk aktivitas pertambangan, penggunaan lahannya terdapat di Kecamatan Porong dengan bahan tambang berupa gas bumi. Sedangkan di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, dan Kecamatan Krembung, merupakan bahan tambang Golongan C seperti pasir kali, batu kali dan tanah urug. Akan tetapi penambangan Untuk golongan C ini perlu dibatasi, karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan jembatan dan longsor.

1.2.2 Status / Penguasaan Tanah

Status tanah di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari status hak milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Tanah Negara.

Sebagian besar status tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah hak milik, baik pribadi/individu maupun kelompok usaha.

Status penguasaan tanah hak milik antara lain untuk penguasaan tanah pertanian, pertambakan, dan permukiman. Sedangkan penguasaan tanah hak guna bangunan adalah pada tanah-tanah yang digunakan untuk perumahan pengembang, sedangkan hak Guna Usaha adalah pada bangunan-bangunan perkantoran. Sedangkan tanah negara yang dapat diidentifikasi adalah tanah-tanah oloran yang berada di tepi pantai.

1.3 Kondisi Sistem Transportasi

1.3.1 Jaringan Jalan

Prasarana jaringan jalan ada yang ada di Kabupaten Sidoarjo kondisinya cukup baik terutama dalam menunjang pola pergerakan barang dan orang, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah. Prasarana jalan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu :

a) Jalan Tol

Jalan tol yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sepanjang 31.300 Km, yaitu jalan Tol Waru-Sidoarjo-Gempol, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Pasuruan (akses penghubung dengan wilayah timur). Sedangkan di wilayah barat terdapat jalan By pass Krian-Balombang yang berfungsi sebagai jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di sekitar pasar Krian.

b) Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua. Jalan arteri primer yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari dua ruas jalan yaitu arah Utara – Selatan (menghubungkan Kota Surabaya – Kabupaten Pasuruan) dan arah Utara – Barat (menghubungkan Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto). Jalan ini melalui Kecamatan Waru, Taman, Krian dan Balongbendo. Jalan arteri primer lingkaran Utara Krian.

c) Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer berdasarkan UU No. 13 Th. 1980/PP No. 26 Tahun 1985 tentang jalan adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. Ruas jalan yang mempunyai fungsi kolektor primer adalah :

- 1) Ruas jalan Krian (jenjang ke II) – Prambon (jenjang ke IV)
- 2) Ruas jalan Porong – Krembung (jenjang IV) - Prambon (jenjang IV)
- 3) Ruas jalan Krian (jenjang II) – Wonoayu (jenjang IV) – Sidoarjo (jenjang I)
- 4) Ruas jalan Krian (jenjang II) – Sukodono – Gedangan
- 5) Ruas jalan Buduran (jenjang IV) – Candi (jenjang IV)

d) Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang I dengan persil atau kota jenjang ke II dengan persil atau kota jenjang ke III dengan persil atau kota jenjang ke III dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota

kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten Sidoarjo antara lain ialah :

- 1) Ruas jalan Taman (jenjang II) – Sukodono (jenjang IV)
 - 2) Ruas jalan Balongbendo (jenjang IV) – Tarik (jenjang IV)
 - 3) Ruas jalan arteri primer Tarik (jenjang IV) – Prambon (jenjang IV)
 - 4) Ruas jalan Tanggulangin (jenjang III) – Tulangan (jenjang IV)
 - 5) Ruas jalan Porong (arteri primer) – Jabon
 - 6) Ruas jalan Gedangan (arteri primer) – Waru
 - 7) Ruas jalan Tulangan – Wonoayu
 - 8) Ruas jalan Waru – Sidoarjo
- e) Jalan Rel Kereta Api

Di Kabupaten Sidoarjo pada saat ini terdapat 2 jalur kereta api yang aktif yaitu:

- 1) Jalur pertama (jalur Barat) yaitu dimulai dari Surabaya – Kecamatan Taman – Kecamatan Krian – Kecamatan Tarik
- 2) Jalur kedua yaitu dimulai dari Surabaya – Kecamatan Waru – Kecamatan Gedangan – Kecamatan Buduran – Kecamatan Sidoarjo – Kecamatan Porong.

Untuk jalur kereta api yang melewati Porong saat ini kondisinya sudah tidak maksimal lagi. Hal ini dikarenakan sebagian rel kereta api terendam lumpur.

Kereta api harus mengurangi kecepatannya saat melewati jalur kereta api Porong ini, khususnya pada rel-rel yang tergenang lumpur.

Selain kedua jalur kereta api tersebut, di Kabupaten Sidoarjo masih ada jalur kereta api yang pada saat ini tidak aktif. Jalur kereta api tersebut menghubungkan :

Kecamatan Sidoarjo – Kecamatan Candi – Kecamatan – Tulangan – Kecamatan Prambon – Kecamatan Tarik.

1.3.2 Status dan Kondisi Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan hampir semua sudah merupakan jalan aspal, hanya beberapa jalan desa dan jalan lingkungan yang masih berupa jalan makadam. Berdasarkan pengelola jalan, jalan arteri primer (Waru-Gedangan-Buduran-Sidoarjo-Candi-Tanggulangun-Porong) dan jalan (Waru-Taman-Krian-Balongsendo) merupakan jalan Propinsi, sedangkan jalan-jalan kolektor lainnya merupakan jalan kabupaten. Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi dan status jaringan jalan di kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan di Kabupaten Sidoarjo

Keadaan Jalan	Panjang Jalan (Km)		
	Negara	Propinsi	Kabupaten
I. Jenis Permukaan	66,23	28,63	1.438,9
a. Aspal	66,23	28,63	866,54
b. Kerikil	-	-	7,41
c. Tanah	-	-	564,95
d. Tidak dirinci	-	-	-
II. Kondisi Jalan	66,23	28,63	866,54
a. Baik	66,23	28,63	636,09
b. Sedang	-	-	29,09
c. Rusak	-	-	181,22
d. Rusak berat	-	-	20,14
III. Kelas Jalan	66,23	28,63	866,54
a. Kelas I	66,23	28,63	8,6
b. Kelas II	-	-	60,92
c. Kelas III A	-	-	797,02
d. Kelas III B	-	-	-
e. Kelas III C	-	-	-
f. Kelas tak dirinci	-	-	-

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2012

1.3.3 Pola Pergerakan

Pola pergerakan meliputi pergerakan barang dan orang/penumpang. Secara umum pola pergerakan di Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh pergerakan ke arah utara-selatan (Surabaya-Pasuruan), utara-barat (Surabaya-Mojokerto), dan ke arah timur (menuju Juanda). Kondisi lalu-lintas jalan di ruas jalan tersebut berada dalam tingkat kepadatan yang tinggi, terutama pada jalur-jalur utama menuju Kota Surabaya dan jalur utama ke arah Barat. Hal ini terjadi pada saat jam puncak (*peak hours*) yaitu pada saat jam pergi dan pulang kerja/sekolah (pagi dan sore hari).

Volume lalu-lintas pada saat jam puncak sangat tinggi, sehingga setiap hari terjadi arus lalu-lintas merambat hingga mendekati kemacetan. Kapasitas jalan utama Waru-Sidoarjo tersebut pada saat jam puncak sudah tidak dapat

menampung volume lalu-lintas tersebut. Disamping itu pada jalan utama menuju Kabupaten Mojokerto, terjadi kelambatan arus lalu-lintas karena banyaknya angkutan umum barang (jenis kendaraan besar) seperti truk, tangki, trailer dan jenis kendaraan lainnya.

2 Gambaran Umum Wilayah Penghasil Ikan Kabupaten Sidoarjo

2.1 Wilayah Penghasil Ikan Kabupaten Sidoarjo

Wilayah penghasil ikan Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada wilayah administrasi kecamatan-kecamatan yang memiliki sumberdaya tambak, wilayah-wilayah tersebut adalah : Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Jabon. Luas Total Wilayah perencanaan adalah 339,516 Km².

Secara administratif wilayah minapolitan ini berada pada wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kota Surabaya
Sebelah Timur	: Selat Madura
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pasuruan
Sebelah Barat	: KecamatanTanggulangin, Porong, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Gedangan dan Taman (Kabupaten Sidoarjo)

Wilayah administrasi perencanaan minapolitan kabupaten sidoarjo terdiri dari 6 kecamatan, 99 desa, 14 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di wilayah minapolitan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Luas Kecamatan dalam Wilayah Minapolitan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
Waru	18	78,769
Sedati	16	43,697
Buduran	14	62,552
Sidoarjo	11/14	41,458
Candi	24	82,451
Jabon	16	30,589
Jumlah	99/14	339,516

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2011& Hasil Perhitungan, 2011

2.2 Pemanfaatan Ruang

Penggunaan lahan di wilayah minapolitan terdiri atas penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Pemanfaatan Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010

Keterangan	Luas (Ha)	Prosentase
Bandar Udara Juanda	595,79	1,72%
Industri	629,49	1,82%
Kawasan Bencana Lapindo	105,03	0,30%
Mangrove	745,98	2,15%
Perdagangan dan Jasa	12,13	0,04%
Perkantoran	10,09	0,03%
Permukiman	5.998,61	17,32%
Ruang Terbuka	195,06	0,56%
Sawah	6.926,22	20,00%
Semak Belukar	215,51	0,62%
Sungai	605,58	1,75%
Tambak	18.548,85	53,55%
Tanah Kosong	27,06	0,08%
Tanah Terbuka	11,35	0,03%
Terminal	9,61	0,03%
	34.636,37	1,00

Sumber :Digitasi Citra SPOT 5 Kabupaten Sidoarjo, Tahun Akuisisi 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar Wilayah perencanaan adalah tambak yang luasnya mencapai 18,548,85 Ha, atau sekitar 53,55% dari luas wilayah perencanaan. Tambak tersebut terdiri dari budidaya perikanan payau dan tawar. Tingginya penggunaan lahan tambak tersebut disebabkan wilayah perencanaan merupakan daerah delta yang sangat subur dan berada di tepian laut. Dominasi penggunaan lahan berikutnya adalah Pertanian, yakni berupa sawah dan ladang dengan luas total sekitar 6.926,22 Ha atau sekitar 20,00% dari luas keseluruhan wilayah perencanaan. Penggunaan lahan dominan lainnya adalah permukiman yang terus berkembang dari waktu-kewaktu, mengingat jumlah penduduk suatu kawasan juga bertambah, luas total lahan permukiman yang ada di wilayah perencanaan baik perumahan formal maupun permukiman kampung adalah sekitar 5.998,61 Ha atau sekitar 17,32%.

Beberapa kawasan tumbuh relatif cepat sedangkan kawasan lainnya relatif lambat. Pertumbuhan permukiman yang terjadi dengan cepat antara lain berada di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati, sebagai akibat dari adanya kegiatan industri dan Bandara Juanda.

2.3 Kondisi Iklim

Kondisi Iklim wilayah perencanaan hampir sama dengan kondisi iklim di beberapa wilayah di Indonesia lainnya, yakni memiliki iklim tropis. Kondisi rata-rata hari hujan di wilayah perencanaan yang tercatat di stasiun pengamatan hujan di beberapa titik di kabupaten Sidoarjo adalah berkisar antara 1.900 – 2.800 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah studi juga berkisar antara 20 – 35 °C. Untuk lebih jelasnya berikut tabel kondisi curah hujan di wilayah perencanaan.

Tabel 6 Kondisi Iklim di wilayah perencanaan

Curah Hujan (mm/th)	Luas Ha	Prosentase
1.900 - 2.000	15.951,67	46,05%
2.100 - 2.400	14.746,05	42,57%
2.500 - 2.800	3.938,65	11,37%
	34.636,37	1,00

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2012

Mayoritas wilayah perencanaan memiliki intensitas curah hujan 1.900 - 2.000 mm/th, dengan luas daerah hampir 46,05% dari total keseluruhan wilayah studi atau sekitar 15.951,67 Ha. Sedangkan wilayah yang memiliki intensitas paling tinggi yakni 2.500 - 2.800 mm/th memiliki luas sekitar 3.938,65 Ha atau hampir 11,37% dari total keseluruhan wilayah perencanaan.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

3.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang gambaran kondisi ideal yang diinginkan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo pada masa datang. Visi haruslah memuat konsep yang jelas dan berisi harapan/ cita-cita yang mungkin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kriteria visi adalah:

- a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo
- b) Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas
- c) Memiliki orientasi terhadap masa depan
- d) Menumbuhkembangkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

- e) Menjamin kesinambungan kepemimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo
- f) Dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan

Misi merupakan penjabaran dari visi; memuat pernyataan yang mengarah pada penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Agar mudah diingat, visi dan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo di rumuskan sebagai berikut:

bP = (p+s+h)i

dimana:

bP = be Professional (menjadi Profesional)

p = productivity (produktivitas)

s = public-services (pelayanan masyarakat)

h = human resources (sumber daya manusia)

artinya: *be professional = Increasing in productivity, quality of public services and human resources.*

Dengan kata lain menjadi profesional sama dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, pelayanan masyarakat, dan kualitas sumberdaya manusia. Dengan demikian, visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah Terwujudnya institusi Dinas Kelautan dan Perikanan professional yang mampu mengembangkan agribisnis kelautan dan perikanan berwawasan lingkungan dan berdaya saing pada Tahun 2015.

Sedangkan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah :

- 1) Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan dan kelautan secara optimal, sejalan dengan misi 1 Kabupaten Sidoarjo yaitu menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agribisnis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan dan kelautan melalui penerapan IPTEKS, sejalan dengan misi 1 Kabupaten Sidoarjo yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
- 3) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha dibidang kelautan dan perikanan
- 4) Menciptakan pola kerja sama kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat dalam pengembangan usaha kelautan perikanan melalui program pemberdayaan kepada pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir.

3.2 Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

3.2.1 Stuktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dalam Rangka menjalankan tugas di bidang pendidikan, sangat diperlukan susunan organisasi untuk mempermudah pembagian kerja dan koordinasi antar bagian organisasi. Dimana susunan tersebut terdiri dari:

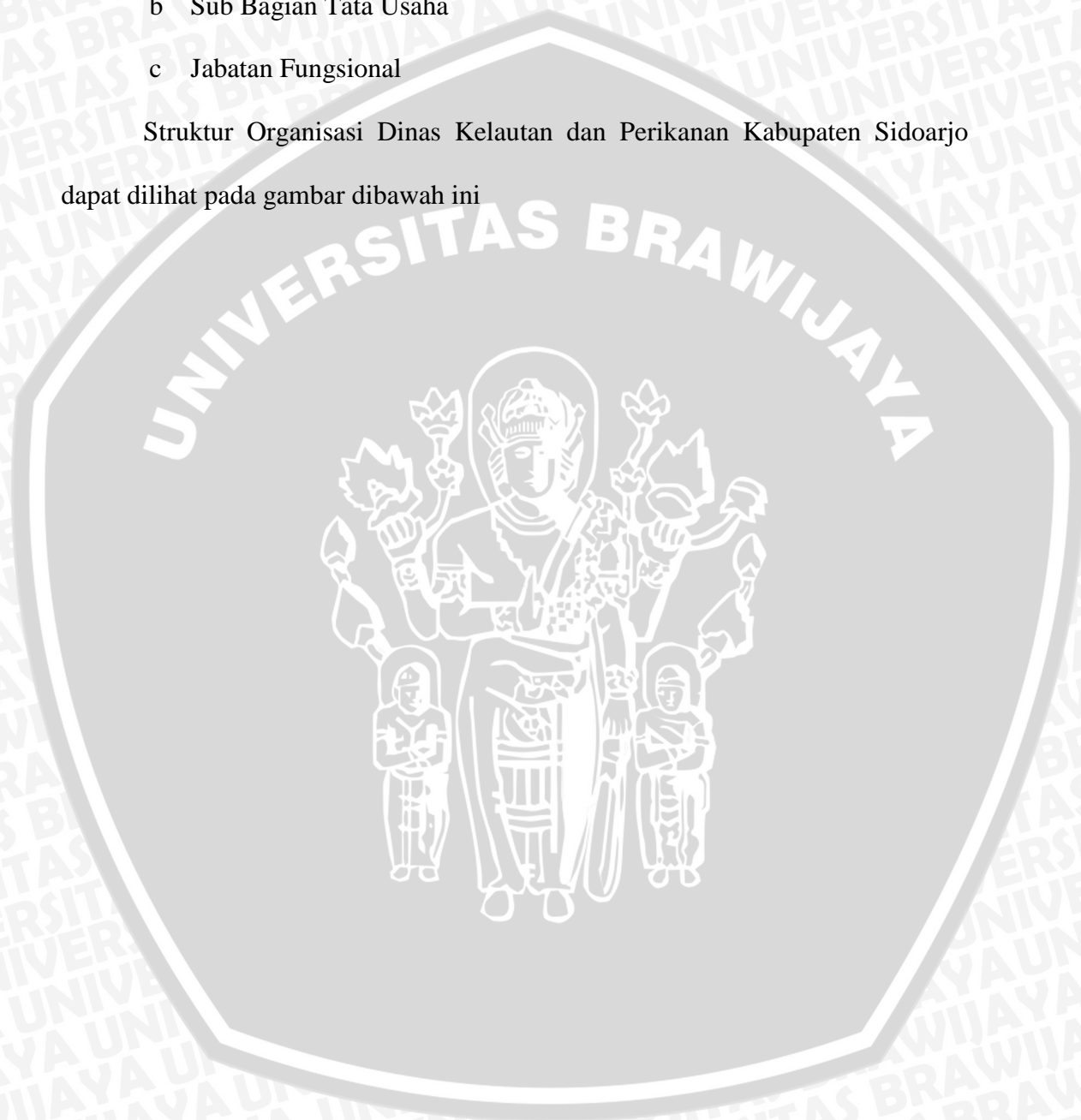
- 1) Unsur Pimpinan ; Kepala Dinas
- 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 - a Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
 - b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c Sub Bagian Keuangan
- 3) Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari:
 - a Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan:
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan
 - b Bidang Sumber Hayati Perairan Darat, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi
 - b) Seksi Pengendalian Mutu Air
 - c Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Perijinan
 - b) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
 - c) Seksi Pengendalian Mutu

4) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pasar Ikan

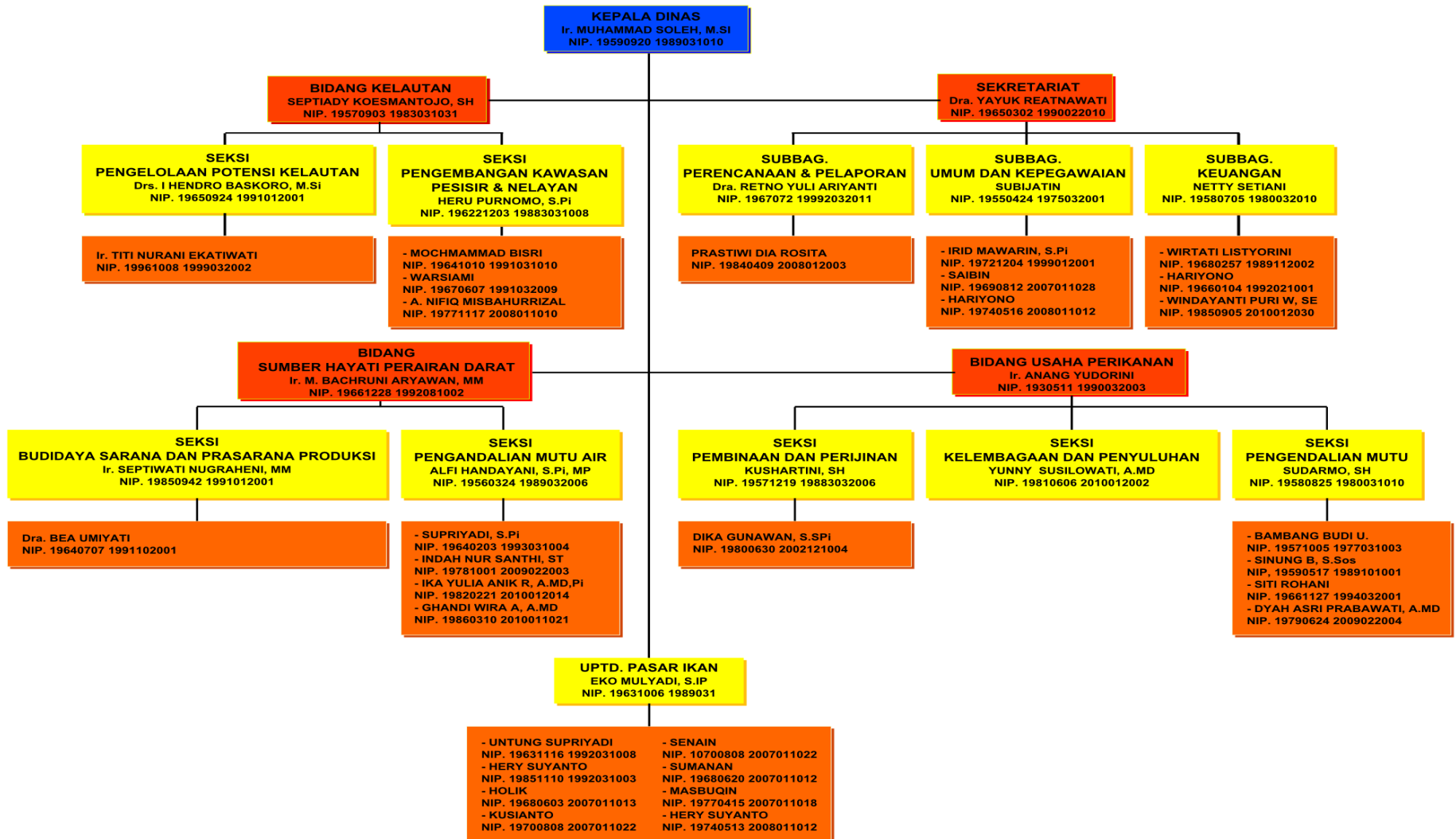
- a Kepala UPT Dinas
- b Sub Bagian Tata Usaha
- c Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4 Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo



3.2.2 Rincian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

1) Bagian Pertama Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan program bidang kelautan, sumber hayati perairan darat, usaha perikanan serta kesekretariatan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2) Bagian Kedua Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretarian mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis
- b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- c) Pengelolaan administrasi keuangan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Dalam sekretariat mempunyai sub bagian dan mempunyai tugas, sub bagian tersebut:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- (a) Mengumpulkan data dan mengolah data dalam rangka Penyusunan dokumen dan kebijakan teknis
- (b) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perijinan (*front Office*) dan pengaduan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan
- (c) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tugas dinas
- (d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- (a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
- (b) Melaksanakan pengelolaan barang
- (c) Melaksanakan administrasi kepegawaian

(d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

(a) Menyusun rencana kebutuhan anggaran

(b) Mengelola administrasi keuangan

(c) Menyusun laporan pengelolaan keuangan

(d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3) Bagian Ketiga Bidang Kelautan

Bidang kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kelautan mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan

b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan

c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan potensi kelautan, pengembangan kawasan pesisir dan nelayan

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam Bidang Kelautan mempunyai beberapa seksi bagian dan mempunyai tugas, seksi bagian tersebut:

(1) Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan Mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan penyusunan program pengelolaan potensi kelautan
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan potensi kelautan
- (c) Melaksanakan pemetaan potensi sumber daya kelautan
- (d) Melaksanakan pengelolaan potensi kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten
- (e) Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan
- (f) Melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, sumber daya ikan dan lingkungannya
- (g) Melaksanakan pengembangan pola tata operasional sarana prasarana penangkapan ikan, tatalaksana jenis produk laut untuk dikembangkan
- (h) Melaksanakan pembinaan teknologi penangkapan ikan, budidaya laut serta perlindungan dan kelestarian sumber hayati laut
- (i) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya kelautan dan jenis biota lainnya
- (j) Memfasilitasi pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan laut

(k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan mempunyai tugas:

(a) Menyiapkan penyusunan program pengembangan kawasan pesisir dan nelayan

(b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan kawasan pesisir dan nelayan

(c) Melaksanakan pembinaan nelayan, sarana (tempat pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan/ tanggul/ plengsengan, tempat pelelangan ikan daerah pesisir) dan prasaranan yang berkaitan dengan perikanan dan pemukiman nelayan

(d) Melaksanakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut

(e) Melaksanaka rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan

(f) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, evaluasi, dan supervise pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan

(g) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang kelautan

(h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

4) Bagian Keempat Bidang Sumber Hayati Perairan Darat

Bidang Sumber Hayati Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sumber hayati perairan darat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang sumber hayati perairan darat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang budidaya, sarana dan prasarana produksi serta pengendalian mutu air
- d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam Bidang Sumber Hayati Perairan Darat mempunyai beberapa seksi bagian dan mempunyai tugas, seksi bagian tersebut:

(1) Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan penyusunan program pengembangan budidaya, sarana dan prasaranan produksi
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan budidaya, sarana dan prasarana produksi

- (c) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan, pembenihan dan bimbingan penerapan perikanan di perairan darat (air payau dan air tawar)
 - (d) Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan
 - (e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ikan
 - (f) Melaksanakan pola pengembangan, rehabilitasi, pengujian, sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan air tawar
 - (g) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan pencegahan hama penyakit ikan perairan darat
 - (h) Memperisapkan pengembangan, pengujian dan sertifikasi benih yang siap dibudidayakan serta dipasarkan
 - (i) Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya
 - (j) Memfasilitasi pelaksanaan eksploitasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan perairan darat
 - (k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Seksi Pengendalian Mutu Air mempunyai tugas:
- (a) Menyiapkan penyusunan program pengembangan pengendalian mutu air

- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan pengendalian mutu air
- (c) Mengumpulkan bahan dan menganalisis, mutu air dan kebutuhan air untuk sumber hayati perairan darat
- (d) Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air serta melakukan pemulihan
- (e) Melaksanakan intensifikasi dan pendataan serta rehabilitasi atau normalisasi saluran tersier
- (f) Melaksanakan tugas ketata usahaan bidang sumber hayati perairan darat
- (g) Pengawasan dan pengendalian PMMT atau HACCP di unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

5) Bagian Kelima Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang usaha perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu

- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Dalam Bidang Usaha Perikanan mempunyai beberapa seksi bagian dan mempunyai tugas, seksi bagian tersebut:

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - (a) Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha dan perijinan
 - (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembinaan dan perijinan
 - (c) Memproses ijin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing
 - (d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelelangan ikan di TPI/ pasar ikan, dan sarana dan pemasaran lainnya milik pemerintah
 - (e) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan usaha perikanan
 - (f) Memberikan pertimbangan teknis terhadap perijinan usaha perikanan

(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan penyusunan program pengembangan bidang kelembagaan
- (b) Memproses akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan
- (c) Melaksanakan pembinaan lembaga dan ketenaga kerjaan perikanan tangkap
- (d) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan
- (e) Melaksanakan promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar
- (f) Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) bidang perikanan
- (g) Melaksanakan identifikasi faktor penentu dan menerapkan hasil pengkajian rekayasa sosial dan ekonomi di tingkat petani
- (h) Memfasilitasi pengembangan usaha perikanan melalui kerja sama dengan pihak lain
- (i) Melaksanakan program ekonomi nelayan masyarakat pesisir (tambak) pengolah hasil perikanan dan petani ikan air tawar
- (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan penyusunan program pengembangan pengendalian mutu
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengendalian mutu
- (c) Menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan mutu usaha pengolahan dan pengawetan hasil perikanan
- (d) Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan
- (e) Pengawasan peredaran benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunua
- (f) Melaksanakan tugas ketata usahaan bidang usaha perikanan
- (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

6) Bidang Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan umum. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berdada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pasar ikan, wilayah kerja meliputi pasar benih ikan, tempat pelelangan ikan dan depo pemasaran ikan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ikan mempunyai tugas:

- a) Mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen
- b) Melaksanakan pelepasan ikan di pasar ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c) Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, menyetorkan dan membukukan retibusi di pasar ikan
- d) Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di pasar ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak
- e) Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di pasar ikan
- f) Memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di pasar ikan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

4 Kepemimpinan pada Depo Pemasaran Ikan

Kepemimpinan dalam Depo Pemasaran Ikan harus mempunyai komunikasi, pengawasan, pengarahan dan pengambilan keputusan dalam memimpin Depo Pemasaran Ikan. Komunikasi, pengawasan, pengarahan dan pengambilan keputusan di dalam Depo Pemasaran Ikan akan di jabarkan sebagai berikut:

1 Komunikasi

Komunikasi dalam kepemimpinan sebagai pusat kekuatan dan dinamisor bagi organisasi. Pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan semua pihak, baik melalui

hubungan formal maupun informal. Suksesnya pelaksanaan tugas pemimpin itu sebaian besar di tentukan oleh kemahiran menjalin komunikasi yang tepat di semua pihak. Dalam berkomunikasi peneliti membagi dalam 3hal yaitu komunikasi dalam sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemasaran. Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Untuk komunikasi pemerintah menunjuk salah satu pedagang untuk menjadi kepala pedagang yang menampung pendapat, keinginan dan keluhan para pedagang. Sehingga pemerintah dapat berkomunikasi dengan para pedagang hanya melalui kepala pedagang. Dalam penanganannya para pegawai Depo Pemasaran Ikan selalu siap dan tanggap untuk menangani keluhan, keinginan dan pendapat semua itu akan di pilih untuk di prioritaskan.”

Tetapi dalam wawancara dengan Bapak Sulis sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Untuk berkomunikasi antara pedagang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan masih kurang optimal dikarenakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan jarang ke kantor Depo Pemasaran Ikan. Para pedagang untuk mengemukakan pendapat dan keluhannya melalui kepala pedagang, tetapi keluhan dan pendapat para pedagang jarang yang terlaksana atau masih hanya omongan belaka.”

2 Pengawasan

Pengawasan atau kontrol adalah bagian dari tugas pemimpin yang memungkinkannya untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari rencana yang sudah dibuat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) suatu organisasi Depo Pemasaran Ikan. Pengawasan atau kontrol meliputi pengukuran dan koreksi terhadap

hasil aktivitas bawahan atau anggota, untuk memastikan bahwa tujuan yang dirancang untuk dicapainya sudah dilaksanakan.

Dalam wawancara dengan bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 februari 2013 menyatakan bahwa:

“Untuk pengawasan pihak Depo Pemasaran Ikan dilakukan setiap hari dari hari senin sampai hari minggu dan untuk waktu dari jam 06.00 sampai 12.00. Pengawasan dimulai dari menertibkan pelelangan ikan, menertibkan pedagang yang berjualan di luar tempat yang disediakan, dan mengawasi mutu ikan yang ada di Depo Pemasaran Ikan.”

Tetapi dalam wawancara dengan Ibu Satunah sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang mengatakan:

“Dalam pengawasan untuk Depo Pemasaran Ikan belum maksimal. Dikarenakan dalam pengawasan pelelangan para pegawai hanya datang dipagi hari saja sampai jam 10 untuk menarik retribusi. Untuk penertiban pedagang yang berjualan di luar area para pegawai Depo Pemasaran Ikan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dikarenakan masih adanya pedagang yang berjualan di luar dari area yang disediakan. Dalam mengawasi mutu ikan tidak ada seorang pegawai yang datang kepada para pedagang untuk melakukan survey mutu ikan yang ada di Depo Pemasaran Ikan. Dalam menertibkan pelelangan ikan belum maksimal, dikarenakan masih adanya para pelelang ikan yang melelang ikanya diluar Borg ikan yang disediakan oleh Depo Pemasaran Ikan. Dikarenakan retribusi yang diambil untuk Depo Pemasaran Ikan terlalu besar.

3 Pengarahan

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti kehendaknya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan suatu organisasi. Dalam wawancara

dengan bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 februari 2013 menyatakan bahwa:

“Pihak Depo Pemasaran Ikan telah memberikan pengarahan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pedagang Depo Pemasaran Ikan. Seperti pengarahan untuk menjaga kehygienisan ikan. Maka dari itu diharuskan jarak antara lantai dengan ikan yang akan dijual setinggi satu meter untuk meminimalisir kuman yang masuk kedalam ikan. Akan tetapi, para pedagang masih saja menggunakan bak air untuk menjual ikan. Bak air yang digunakan oleh pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan tingginya hampir sama dengan lantai. Untuk menjaga ketertiban para pedagang sudah diarahkan untuk berjualan ikan di tempat yang disediakan supaya Depo Pemasaran Ikan menjadi suatu bangunan yang tertata rapi dan baik untuk menjalankan usaha perikanan.”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Pengarahan yang dilakukan oleh Pemimpin Depo Pemasaran ikan sudah optimal. Dikarenakan setiap pegawai diarahkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pedagang. Dalam melaksanakan arahan pemimpin para pegawai dengan sigap dan tegas untuk menertibkan pedagang dan menjaga kebersihan Depo Pemasaran Ikan.”

Tetapi dalam wawancara dengan Ibu Rolan sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang mengatakan:

“Pengarahan kepemimpinan kepada pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan dalam pengarahan kebersihan, ketertiban pedagang dan kehygienisan ikan para pedagang belum merasakan pengarahan dari pemimpin. Sehingga para pedagang dalam menjaga kebersihan melakukannya dengan inisiatif sendiri, dikarenakan pihak Depo Pemasaran Ikan hanya mengambil retribusi sampah tanpa ada penanganannya. Untuk ketertiban para pedagang yang berjualan diluar area yang sudah disediakan oleh Depo Pemasaran Ikan, para pedagang tersebut hanya mendapatkan teguran yang tidak tegas. Oleh karena itu para pedagang nakal tersebut kembali lagi berjualan diluar area yang sudah disediakan. Untuk

kehigienisan ikan, para pedagang menggunakan alat seadanya dan sepengetahuan para pedagang ikan untuk memperkirakan seberapa higienis ikan yang dijual.”

4 Pengambilan Keputusan

Dalam kondisi ketidakpastian dengan banyaknya perubahan yang mendadak, maka aktivitas pengambilan keputusan adalah hal yang paling sulit dalam manajemen suatu organisasi, namun mengambil keputusan adalah hal yang paling penting bagi pemimpin Depo Pemasaran ikan. Dalam wawancara dengan bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 februari 2013 menyatakan bahwa:

“Dalam mengambil keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan belum berani mengambil tindakan. Dikarenakan untuk mengambil keputusan harus ada persetujuan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan tidak berani mengambil keputusan untuk melakukan suatu perubahan dalam menanggapi keluhan dan keinginan pedagang di Depo Pemasaran Ikan. Ketidakberanian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dikarenakan juga anggaran yang terbatas.”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengambilan keputusan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan kurang adanya sifat pemimpin yang berani mengambil resiko sebuah keputusan. Dikarenakan dalam mengambil keputusan Kepala Unit Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan menunggu apa yang di katakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.”

Tetapi dalam wawan cara dengan bapak Gunawan sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengambilan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan kurang bijak, dikarenakan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan mengambil keputusan tidak sesuai dengan keinginan para pedagang, keputusan yang diambil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkesan otoriter.”

5 Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

5.1 Depo Pemasaran Ikan

Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo terletak pada Jalan Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo yang berfungsi untuk memasarkan ikan, menampung ikan dan pelelangan ikan pada pedagang yang masuk di depo pemasaran ikan. Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Depo Pemasaran Ikan adalah suatu bangunan yang di siapkan oleh pemerintah, untuk memasarkan ikan agar pemasaran dapat di pantau oleh pemerintah. Oleh karena itu depo pemasaran ikan di bangun agar pengusaha dan masyarakat mudah untuk mendapatkan ikan yang higienis dan segar. Depo Pemasaran Ikan ini berdiri di atas lahan 3,8 ha mempunyai luas lahan parker seluas 500m², Mempunyai Borg ikan sebanyak 17 Borg dan mempunyai area pasar ikan segar. Selaku pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan pasar *hygienis* (pasar yang baru) di upayakan menjadi salah satu pusat pemasaran ikan di Jawa Timur”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tanggal 08 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Depo pemasaran ikan adalah tempat pemasaran ikan yang baru. sebelum Depo Pemasaran Ikan bertempat di Jalan Lingkar Timur Desa Bluru Kidul, bertempat di Karanggayam desa Bulu Sidokare dan mempunyai nama Pasar Ikan. Pasar Ikan Karanggayam tempatnya kumuh, sempit dan tidak tertata. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk memindahkannya Pasar Ikan Karanggayam ke Depo Pemasaran Ikan. Mengenai prosedur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan, ikan dari petani ikan masuk ke borg-borg yang di sediakan selanjutnya di lelang dengan banyak pengusaha-

pengusaha ikan. Dari pelelangan tersebut harga ikan selalu bersaing dan petani ikan dapat menjual ikan dengan harga yang disepakati. Setelah di lelang, ikan tersebut di bawa oleh pengusaha untuk di distribusikan oleh pengusaha itu sendiri.”

Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo dapat diharapkan mampu mengatasi masalah naik turunnya harga ikan karena jual beli di DPI melalui lelang, perputaran produksi ikan yang melalui DPI bias mencapai 10 sampai 15 ton/hari.

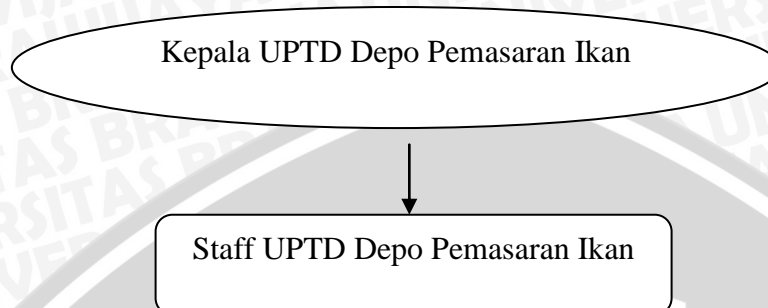
Pemerintah mendapatkan retribusi sebesar 5% dari hasil harga jual yang di sepakati oleh Borg dan pengusaha. Ikan masuk pada bulan November sampai Maret mencapai tiga sampai lima ton per hari. Apabila memasuki bulan April sampai Oktober mencapai sepuluh sampai dua puluh ton per hari. Dari ikan masuk yang begitu besar maka pemerintah ingin mewujudkan Depo Pemasaran Ikan sebagai salah satu pusat pemasaran ikan di Jawa Timur.

5.2 Organisasi dan Pembagian Tugas dalam Depo Pemasaran Ikan

5.2.1 Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan

Organisasi dalam Depo Pemasaran di pegang oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) organisasinya di pimpin oleh Kepala Unit Teknis Dinas (UPTD) dan mempunyai bawahan Staff. Berikut ini adalah gambar organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan:

Gambar 5 Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan sangat sederhana hanya dengan delapan orang pegawai, terdiri dari satu orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran ikan dan tujuh Orang Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan. Berikut ini adalah nama-nama yang menjabat di organisasi di Depo Pemasaran Ikan.

Tabel 7 Daftar Pegawai dalam Depo Pemasaran Ikan

Nama	NIP	Jabatan
Eko Mulyadi, S.IP	19631006 198903 1 010	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Untung Supriyadi	19631116 199203 1 008	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Holik	19581110 199203 1 003	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kusianto	19680603 200701 1 013	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Senain	19700808 200701 1 022	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Sumanan	19680620 200701 1 017	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Masbuqin	19770415 200701 1 018	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Hery Suyanto	19720805 200701 1 012	Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Sumber: Bagan struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011

Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Untuk Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan ini sangat sederhana dikarenakan hanya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Depo Pemasaran Ikan dan Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan. dikarena kerampingan organisasi di Depo Pemasaran Ikan pemimpin dapat mengatur dengan optimal.Selaku fungsi Depo Pemasaran Ikan yang memasarkan ikan dan tempat keluar masuk nya ikan atau sirkulasi ikan untuk di pasarkan ke pengusaha – pengusaha ikan di berbagai daerah.”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012 yang mengatakan bahwa:

“Dalam organisasi di Depo Pemasaran Ikan hanya terdapat delapan orang, satu orang sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan tujuh orang sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).Oleh karena itu pembagian tugas dalam Depo Pemasaran Ikan cukup sederhana untuk melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).”

Tetapi dalam wawancara dengan Ibu Sulastri sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang mengatakan bahwa:

“Organisasi di Depo Pemasaran Ikan yang diketahui oleh pedagang hanya Kepala (UPTD) Depo Pemasaran Ikan dan staff Depo Pemasaran Ikan. Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan masih belum optimal atau belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya kerja sama antara staff Depo Pemasaran Ikan unruk melakuka tugas para pegawai seperti menjaga kebersihan dan ketertiban.”

5.2.2 Pembagian Tugas dalam Depo Pemasaran Ikan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan umum. Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan kelautan, dan meliputi pasar benih ikan, tempat pelalangan dan depo pemasaran ikan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan mempunyai Tugas:

- a) Mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen.
- b) Melaksanakan pelelangan ikan di Depo Pemasaran Ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di Depo Pemasaran Ikan.
- d) Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di Depo Pemasaran Ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak.
- e) Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di Depo Pemasaran Ikan.
- f) Memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan.

- g) Melaksanakan Tugas-Tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Tugas para Staff Depo Pemasaran Ikan adalah ; mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen, melaksanakan pelelangan ikan di Depo Pemasaran Ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di Depo Pemasaran Ikan, memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di Depo Pemasaran Ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak. mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di Depo Pemasaran Ikan. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan. Melaksanakan Tugas-Tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.”

Tetapi dalam wawancara dengan Ibu Rolan sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Tugas para staff Depo Pemasaran Ikan dalam mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyaknya para pedagang yang berjualan di luar area yang disediakan. Dalam melaksanakan pelelangan ikan para pegawai di Depo Pemasaran Ikan sudah bagus karena sudah melaksanakan tugas dengan baik untuk pelelangan ikan. Untuk melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di Depo Pemasaran Ikan, para pegawai Depo Pemasaran Ikan sangat cepat dalam pemungutan retribusi. Untuk memelihara fasilitas-fasilitas, mengusulkan pengadaan dan perbaikan yang rusak masih kurang maksimal dikarenakan masih banyak bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas yang kumuh, kotor dan tidak terawat seperti bangunan yang ada di bagian belakang sangat tidak layak. Dalam perbaikan bagian bangunan yang rusak, pemerintah hanya minta retribusi yang lumayan tetapi masih saja kurang maksimal untuk memperbaiki fasilitas yang ada seperti contoh genteng atau atap yang bocor, meskipun perbaikan telah dilakukan akan tetapi masih terdapat kebocoran. Dalam mengawasi dan pengendalian mutu ikan,

para pegawai Depo Pemasaran Ikan jarang mengawasi dan mengendalikan apakah masih layak atau tidak. Jadi, para pedagang sendiri yang memperkirakan apakah ikan tersebut masih layak untuk di jual atau tidak. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum ada dari pemerintah yang memberikan pembinaan, untuk perlindungan kepada para produsen dan pedagang, sehingga para pedagang membuat organisasi untuk memberikan perlindungan. Jadi para pedagang memilih salah satu pedagang untuk menjaga gudang dan pedagang untuk menjaga. Untuk satu ini para pegawai sangat sigap melaksanakan tugas dari Kepala Dinas. Salah satu contoh apabila ada pejabat yang mau datang, para pegawai langsung *stanby* setiap waktu untuk menjaga dan membersihkan Depo Pemasaran Ikan.”

5.3 Optimalisasi yang dilakukan

a) Sarana dan Prasarana

Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo berdiri di atas lahan seluas 3,8 hektar mempunyai fasilitas area parkir yang sangat luas yaitu 500 m². Dalam Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo juga membangun Borg yang dahulu hanya 14 Borg sekarang menjadi 17 Borg dan mempunyai area pasar ikan segar. Untuk bangunan yang ada di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

Tabel 8 Bangunan yang ada di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo

Bangunan	Sebanyak
Kantor	1 Unit
Stand Ikan Segar	27 Unit
Stand Mamin	10 Unit
Pergudangan	1 Unit
Kolam Pancing	2 Petak
Ponten	1 Unit
Tandor Air	1 Unit
Dermaga	1 Unit
Halte Dermaga	1 Unit

Sumber : Laporan UPTD Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010

Dari tabel diatas untuk sarana dalam bangunan sudah mencukupi dalam menjalankan usaha perikanan. Dikarenakan didalam Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo mempunyai semua hal yang menunjang dalam menjalankan usaha perikanan seperti; kantor, stand ikan segar, stand mamin, pergudangan, tendon air, dermaga, halte dermaga.

Dalam sanitasi di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dikarenakan, ditengah dan sekeliling Depo Pelelangan serta stand ikan segar terdapat saluran air/ gorong-gorong yang cukup memadai dan didukung pembuangannya langsung ke sungai.

Untuk kondisi prasarana mempunyai peralatan yang ada di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo, dari Laporan UPTD Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo:

- a. Alat Penghancur es
- b. Meja Almunium
- c. Cool Box
- d. Tandon Ikan
- e. Penyangga timbangan
- f. Timbangan

Peralatan yang ada di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo dirasa sudah mencukupi untuk menjalankan usaha perikanan di Depo Pemasaran Ikan.

Dikarenakan dalam menjalankan usaha perikanan di Depo Pemasaran Ikan harus

mempunyai peralatan alat penghancur es, meja aluminium, cool box, tandon ikan, penyangga timbangan dan timbangan.

Untuk air yang tersedia di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo diambil dari sumur bor serta didukung oleh tandon air. Untuk listrik Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo saat ini sebesar 3900 watt Voltase 220. Untuk akses jalan yang ada sangatlah lebih dari cukup dikarenakan, jalan yang ada merupakan jalan baru sebagai Ring Road Sidoarjo bagian timur namun masih dirasa kurang kalau yang melewati jalur tersebut hanya kendaraan angkutan barang lebih baik lagi kalau angkutan penumpang atau angkutan umum antar kota juga melewati jalur tersebut maka keberadaan Depo Pemasaran Ikan akan lebih eksis dikarenakan masyarakat banyak yang tahu.

Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Untuk Sarana dan Prasarana di Depo Pemasaran Ikan perkembangan Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo meningkat. Dikarenakan dahulu Depo Pemasaran Ikan mempunyai 14 Borg dan sekarang mempunyai 17 Borg. Untuk stand sudah memenuhi kebutuhan para orang yang melakukan pelelangan dan orang yang melakukan transaksi di area pasar ikan. Fasilitas lainnya adalah mushola dan tempat pancing. Tempat pancing tersebut digunakan untuk merangsang para pengunjung selain membeli ikan di area pasar ikan pengunjung juga bisa memancing. Mengoptimalkan Depo Pemasaran di Kabupaten Sidoarjo dalam hal sarana dan prasarana sudah cukup hanya kurangnya transportasi angkot untuk masyarakat yang membutuhkan ikan dengan jumlah kecil. Tempat Depo Pemasaran Ikan sangat strategis untuk pengusaha dikarenakan akses dengan jalan besar sangat baik. Tetapi, untuk para masyarakat yang membutuhkan ikan sedikit dan tidak punya alat transportasi (sepeda motor atau mobil) sendiri akan sulit karena tidak adanya

angkot yang lewat ke Depo Pemasaran Ikan ini. Untuk sirkulasi ikan dalam jumlah besar sangatlah lancar dikarenakan setiap ikan datang selalu ada pengusaha yang menunggu untuk mendapatkan ikan tersebut. Jadi dalam setiap hari ikan dalam jumlah besar selalu habis. Para pengusaha juga membutuhkan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk transaksi. Para pengusaha cara transaksi yang mudah maka dari itu pengusaha menginginkan adanya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk menunjang transaksi yang mudah dan cepat. Pihak Depo Pemasaran Ikan sudah mengajukan kepada para pihak Bank. Tetapi, pada pihak Bank bilang untuk didirikannya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di daerah Depo Pemasaran Ikan kurang Strategis.”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012, mengatakan bahwa:

“Dalam sarana dan prasarana Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo sangat mencukupi karena sudah melengkapi kebutuhan para produsen dan pengusaha dalam bangunan dan transportasi. Dari pada pasar ikan yang dulu, dikarenakan pasar ikan dahulu lebih sempit dalam Borg, tempat parkir, dan akses jalannya juga sempit. Kalau sekarang jalannya sudah jalan besar untuk akses Surabaya – Pasuruan, sehingga untuk pengusaha besar gampang yktum mengakses Depo Pemasaran Ikan dan tempat parkirnya sangat memadai dikarenakan fasilitas Depo Pemasaran Ikan lahan parkir seluas 500m². Dalam tempat Depo Pemasaran Ikan memang diperuntukkan untuk para pengusaha membeli ikan dalam jumlah besar. Jadi, Depo Pemasaran Ikan mengutamakan kepada para pengusaha untuk akses, lahan parkir dan tempat yang strategis untuk pengusaha dalam pengiriman ikan.”

Tetapi dalam wawancara dengan Bapak Sulis sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang mengatakan:

“Dalam sarana dan prasarana pada Depo Pemasaran Ikan sudah cukup dalam lahan parkir dan tempat pelelangan. Tetapi masih ada yang kurang yaitu transportasi umum. Karena tidak adanya transportasi umum yang masuk untuk menjangkau Depo Pemasaran Ikan, pendapatan para pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan jauh berkurang dari pada di Pasar Ikan yang dahulu. Para pedagang menginginkan adanya transportasi umum untuk menjangkau Depo Pemasaran Ikan. Untuk bangunan memang sudah memenuhi tetapi

kurang optimal dikarenakan masih banyak bangunan yang tidak terpakai atau menganggur. Disebabkan letaknya yang terlalu dalam, jadi para pedagang merasa bangunan tersebut kurang strategis dan masih banyaknya pedagang yang berjualan di emperan. Pedagang mau untuk menempati bangunan tersebut asal kan bangunan tersebut ditata rapi dan tidak ada pedagang yang berjualan di emperan. Dalam bangunan untuk penyimpanan ikan dahulu sebelum ada perubahan bangunan untuk penyimpanan ikan lumayan luas. Tetapi ada perubahan bangunan menjadi sangat sempit hanya bisa menyimpan ikan sedikit.”

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Optimalisasi yang dilakukan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo sangat diperhatikan karena pemerintah harus membeikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di pasar ikan dalam Depo Pemasaran Ikan. Pembinaan yang dilakukan untuk para pedagang Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo harus menjaga *Hygienis* ikan yang jual dikarenakan pemerintah Sidoarjo menjadikan Depo Pemasaran Ikan salah satu pusat pemasaran ikan di Jawa Timur. Oleh karena itu dalam penyuluhan menjaga *hygienis* ikan harus di jaga benar. Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, mengungkapkan:

“ Untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo dilakukan penyuluhan kepada para pedagang agar menjaga kehygienisan ikan dan kesegaran ikan, tetapi banyak pedagang yang mengacuhkannya, sehingga di Depo Pemasaran Ikan tetap menjajakan ikannya di bak bak yang tingginya hampir sama dengan lantai. Akan tetapi untuk menjaga kehygienisan ikan harusnya diatas satu meter dari atas lantai untuk meminimalis kuman yang masuk ke ikan yang akan di jual tersebut. Penyuluhan untuk Sumber Daya Manusia khususnya para pedagang mengambil dana yang besar. Tetapi, tetap saja mengacuhkan kehygienisan

ikan. Sulit juga mengatur para pedagang untuk di tata rapi, dikarenakan pihak Depo Pemasaran Ikan sudah menyediakan bangunan khusus para pedagang. Masih adanya pedagang yang berjualan di emperan-emperan dikarenakan takut tidak laku dagangannya.”

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Untung Supriyadi sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di dalam Depo Pemasaran Ikan pemerintah sering mengadakan penyuluhan untuk berdagang tertib dan mematuhi peraturan yang ada. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak pedagang yang berdagang tidak dalam bangunan yang disediakan. Semua pedagang mengatakan takut tidak laku karena bangunannya agak masuk kedalam sehingga banyak pedagang yang berjualan lebih ke depan menurut para pedagang kalau agak kedalam membuat pengunjung mengambil yang lebih dekat dengan parkir karena tidak perlu berjalan jauh.”

Tetapi dalam wawancara dengan Ibu Lika sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengoptimalan Sumber Daya Manusia belum adanya pelatihan dalam mutu ikan dari pegawai Depo Pemasaran Ikan. Sehingga pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan menjual ikan dengan seadanya. Dalam hal parkir tidak ada Sumber Daya Manusia yang mengatur hanya mengambil retribusi saja, sehingga kendaraan yang parkir di Depo Pemasaran Ikan semuanya sendiri oleh karena itu parkir di Depo Pemasaran Ikan tidak tertata rapi. Dalam pelatihan atau penyuluhan untuk menjaga *hygienis* ikan belum ada tindakan dari para pegawai Depo Pemasaran Ikan. Oleh karena itu para pedagang menggunakan alat seadanya dan sepengetahuan para pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan untuk memperkirakan seberapa *hygienis* ikan yang dijual tersebut.”

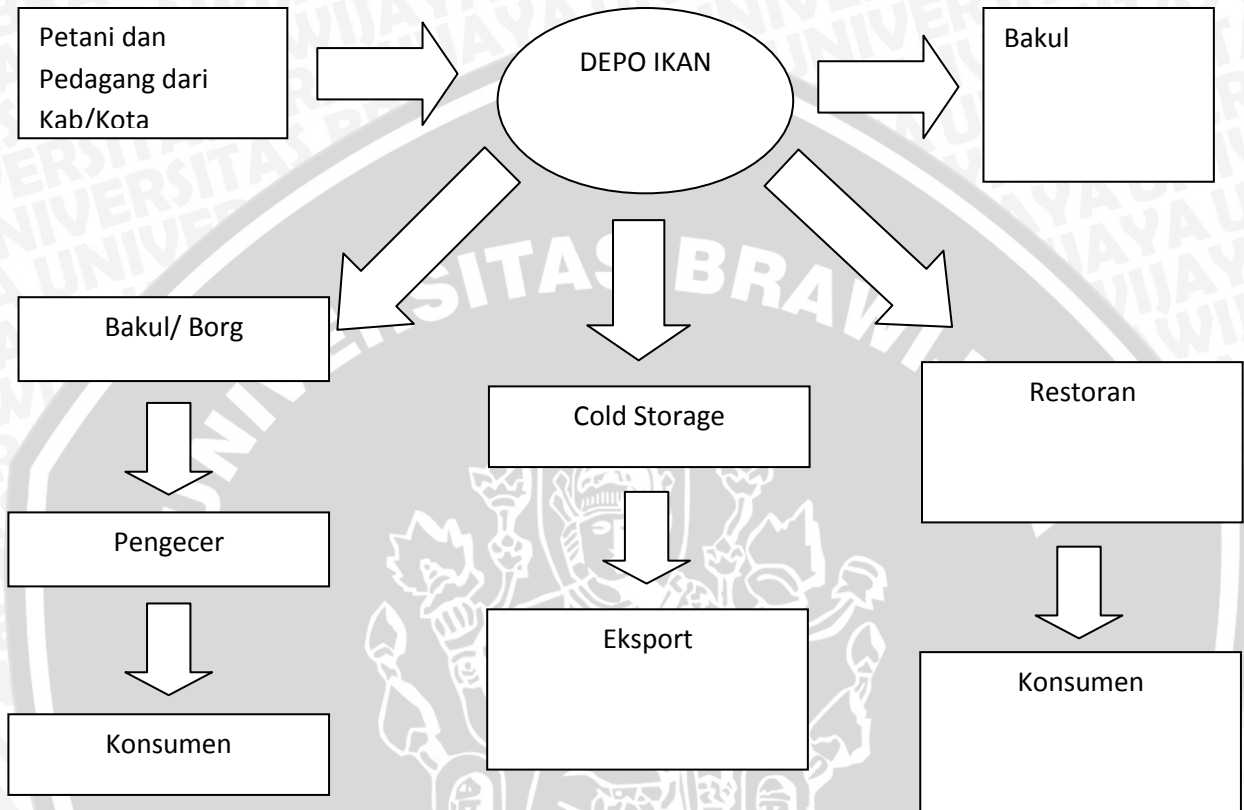
c) Pemasaran

Dalam pemasaran pihak Depo Pemasaran Ikan sudah membangun sebuah kolam pancing untuk membuat Depo Pemasaran Ikan bukan cuma ramai di pagi hari pada saat pelelangan ikan saja. Depo Pemasaran Ikan terlihat sepi pada siang hari apalagi di sore hari Pasar Ikan di Depo Pemasaran Ikan masih ada di sore hari. Untuk pengunjung yang banyak datang hanya di hari sabtu, minggu dan tanggal merah atau hari libur. Dikarenakan pengunjung ke Depo Pemasaran Ikan untuk membeli ikan dalam jumlah kecil merasa rugi. Rugi perjalanan yang memakan biaya lumayan dikarenakan transportasinya umum untuk menuju ke Depo Pemasaran Ikan tidak ada.

Pihak pegawai Depo Pemasaran Ikan untuk pemasarannya belum mempunyai wadah dalam mempromosikan Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah pun kurang berperan serta untuk mempromosikan Depo Pemasaran Ikan kepada masyarakat. Oleh karena itu Depo Pemasaran Ikan kurang di kenal oleh masyarakat.

Berdasarkan rantai pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo, Gambar rantai tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6 Rantai pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Laporan UPTD DEPO PEMASARAN IKAN Kabupaten Sidoarjo tahun 2010

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rantai pemasaran di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo mempunyai 4 alur dalam pemasaran ikan. Alur-alur tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan pertama

Pada alur pertama ini ikan dari petani ikan yang berada di Kabupaten Sidoarjo masuk ke Depo Ikan di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo. Ikan dari petani diambil oleh bakul dan bakul akan mendistribusikan ke Surabaya,

Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk, Pasuruan, Malang bahkan sampai Probolinggo. Terlihat jelas pada kabupaten Probolinggo termasuk daerah minapolitan tetapi pasar disana tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk daerahnya dan dikarenakan ikan di Sidoarjo terkenal tidak berbau tanah.

b. Alur pemasaran di Depo Pemasaran Ikan kedua

Pada alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan kedua ikan dari petani ikan yang berada di Kabupaten Sidoarjo masuk ke Depo Ikan Kabupaten Sidoarjo, ikan dari petani ikan diambil oleh baku atau borg yang ada di Depo Pemasaran Ikan, setelah itu dari bakul atau borg disalurkan kepada pengecer. Dari pengecer akan langsung dijual kepada konsumen

c. Alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan ketiga

Pada alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran ikan ketiga ikan dari petani ikan yang berada di Kabupaten Sidoarjo masuk ke Depo Ikan Kabupaten Sidoarjo, ikan dari petani ikan diambil oleh restoran. Dari restoran akan diolah dahulu sebagaimana restoran tersebut, sesudah diolah hasil olahan tersebut akan dijual kepada konsumen.

d. Alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan keempat

Pada alur pemasaran ikan di Depo Pemasaran Ikan keempat ikan dari petani ikan yang berada di Kabupaten Sidoarjo masuk ke Depo Ikan Kabupaten Sidoarjo, ikan dari petani akan dimasukkan kedalam cold storage untuk

penyimpanan ikan. Ikan yang berasal dari petani dipilih dahulu sebelum dimasukkan kedalam cold storage dikarenakan yang berada didalam cold storage akan di export keluar negeri.

Dalam wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi, S.IP Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 07 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Untuk pemasaran Depo Pemasran Ikan, ikan selalu habis dan dikirim ke daerah Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Kediri, Jombang bahkan sampai Nganjuk. Dalam pemasarannya para pengusaha datang sendiri untuk membeli ikan dalam jumlah besar dan ikan sidarjo terkenal ikan yang tidak bau tanah.

Tetapi dalam wawancara dengan Bapak Ruli sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Pemasaran di dalam Depo Pemasaran Ikan kurangnya promosi untuk mendatangkan para masyarakat, dikarenakan dalam pemasaran untuk sektor pedagang kecil promosi sangat penting untuk mengenalkan kepada masyarakat, Sehingga masyarakat mempunyai minat untuk datang ke Depo Pemasaran Ikan. Depo Pemasaran Ikan hanya ramai pada pagi hari itu pun untuk pengusaha-pengusaha yang mau membeli ikan dalam jumlah besar. Untuk pembelian ikan eceran masih kurangnya minat masyarakat, Sehingga para pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan menginginkan pemerintah membuat event-event untuk mempromosikan Depo Pemasaran Ikan dan para pedagang ikan kecil menginginkan adanya pedagang sayur, pedagang rempah-rempah dan pedagang daging agar menarik minat masyarakat untuk datang ke Depo Pemasaran Ikan. Masyarakat yang datang di Depo Pemasaran ikan tidak hanya terpusat untuk pembelian ikan tetapi masyarakat bisa membeli komoditas pasar yang lain seperti: daging, sayur dan rempah-rempah.”

Dalam wawancara dengan Ibu Tri sebagai Masyarakat yang sedang berbelanja ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 Februari 2012 yang menyatakan:

“Untuk Depo Pemasaran Ikan masyarakat banyak yang mengira bahwa Depo Pemasaran Ikan hanya buka di pagi hari. dikarenakan dari luar Depo Pemasaran Ikan jam 11 sudah seperti bangunan kosong yang sepi. Padahal pada siang hari didalam Depo Pemasaran Ikan masih ada pedagang ikan yang berjualan. Oleh karena itu menurut masyarakat menginginkan promosi yang besar atau mengadakan event-event tertentu agar dapat meramaikan Depo Pemasaran Ikan dan dapat masyarakat mengetahui kalau Depo Pemasaran Ikan meskipun di siang hari masih bisa untuk bertransaksi ikan.”

6. Faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi Depo Pemasaran

Ikan guna menjalankan usaha perikanan

6.1 Faktor penghambat dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

a. Tidak adanya transportasi umum

Umumnya dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo transportasi umum itu sangat penting dalam menjalankan usaha perikanan. Transportasi umum berperan penting untuk mempermudah para konsumen datang khususnya para konsumen pembeli ikan dalam jumlah kecil. Sehingga para konsumen tidak merasa kebingungan untuk menuju Depo Pemasaran Ikan. Dalam wawancara dengan bapak bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 februari 2013 menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan salah satunya adalah transportasi umum. Hal ini disebabkan lokasi Depo Pemasaran Ikan yang jauh dari pemukiman. Padahal untuk menjalankan usaha perikanan perlu transportasi umum yang gampai di jangkau oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah, para pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas sudah mengusulkan kepada para supir

angkot untuk melewati Depo Pemasaran Ikan. Akan tetapi para supir angkot menolak. Dikarenakan daerah Depo Pemasaran Ikan jarang pemukiman sehingga para supir angkot mengira akan merosotnya pendapatan sehari-harinya.”

b. Kurangnya promosi

Umumnya dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo promosi harus dilakukan untuk menarik konsumen. Tetapi pihak Depo Pemasaran jarang. Dalam wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2013 menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam mengoptimalkan Depo Pemasaran Ikan kurangnya promosi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian kepada pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan yang berjualan setiap hari. Bahwa konsumen banyak datang di hari sabtu, minggu dan libur besar saja. Apabila di hari biasa konsumen sepi, dikarenakan konsumen hanya mengetahui bahwa pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan buka di hari sabtu, minggu dan libur besar saja. Ada konsumen yang datang di hari biasa tapi tak seramai di hari sabtu, minggu dan hari besar.”

c. Kurangnya kontrol pegawai Depo Pemasaran Ikan

Dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan harus adanya kontrol dari pegawai depo Pemasaran Ikan. Tetapi kontrol Depo Pemasaran Ikan hanya berlangsung untuk mengambil retribusinya saja, dalam penanganan selanjutnya tidak ada. Pegawai Depo Pemasaran Ikan sangat jarang mengontrol untuk kebersihan dan bangunan yang rusak. Dalam wawancara dengan Ibu Lika sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2013 menyatakan bahwa:

“Kontrol yang dilakukan para pegawai Depo Pemasaran Ikan sangat lah kurang optimal. Dikarenakan para pegawai yang datang hanya di pagi hari saja untuk mengambil retribusi. Dalam ngontrol ketertiban, kebersihan dan

bangunan sangatlah jarang dikontrol oleh pegawai Depo Pemasaran Ikan. Seperti kebersihan dan keterbiban masih banyak kotoran atau sampah yang menggunung tanpa ada penanganan selanjutnya dan masih adanya para pedagang yang berjualan di luar area yang disediakan oleh Depo Pemasaran Ikan.

6.2 Faktor pendukung dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

a. Air

Salah satu faktor pendukung dalam Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan adalah air. Dikarenakan air sangatlah penting untuk menjaga kebersihan dan kesegaran ikan. Oleh karena itu air sangat di butuhkan oleh para pedagang dan para pelelang. Dalam wawancara dengan bapak bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 08 februari 2013 menyatakan bahwa:

“Kelimpahan air di Depo Pemasaran Ikan sudah terpenuhi di setiap sudut Depo Pemasaran Ikan. Dikarenakan air sangatlah penting untuk menjaga kesegaran dan kebersihan ikan. apabila tidak ada air maka untuk menjaga kesegaran dan kebersihan ikan akan sangat sulit untuk menjaga kesegaran dan kebersihan ikan.”

b. Area parkir yang luas dan bangunan pelelangan yang besar

Area parkir yang luas dan bangunan pelelangan yang besar sehingga dapat menampung borg sebanyak tujuh belas Borg itu salah satu faktor pendukung untuk mengoptimalkan Depo Pemasaran Ikan. Oleh karena itu membuat para pengusaha gampang untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam wawancara dengan Bapak Ruli

sebagai pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan pada tanggal 06 Februari 2013 menyatakan bahwa:

Salah satu pendukung untuk pengoptimalan Depo Pemasaran Ikan ini adalah mempunyai area parkir yang luas dan bangunan pelelangan yang besar. Area parkir di Depo Pemasaran Ikan seluas 500m² sehingga dapat menampung kendaraan konsumen dan petani ikan yang akan melakukan transaksi di Depo Pemasaran Ikan. Untuk bangunan pelelangan yang besar ini dapat menampung 17 Borg. Sehingga para petani ikan atau nelayan tidak kebingungan dalam melelangkan ikannya.

B. Pembahasan

1 Kepemimpinan pada Depo Pemasaran Ikan

1.1 Komunikasi

Komunikasi yang dipakai oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan adalah komunikasi dua arah (*two ways communication*). Komunikasi berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik baik dari komunikator maupun komunikan. Komunikasi dua arah dapat terjadi secara *vertical*, *horisontal* dan *diagonal*. Melihat dari data yang disajikan Kepala Unit Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan berkomunikasi dua arah dan terjadi secara *diagonal*. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang tingkat, kedudukan, serta wewenangnya berbeda. Yang menjadi komunikator adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan, untuk yang menjadi komunikan adalah Kepala Pedagang Depo Pemasaran Ikan.

Terlihat dari penyajian data bahwa komunikasi antara Kepala pedagang dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan jarang terjadi. Dikarenakan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan jarang bisa ditemui. Untuk mengemukakan pendapat, keinginan dan keluhan para pedagang hanya melalui Kepala pedagang. Dalam penanganan pendapat para pedagang jarang terlaksana seperti contohnya, pengusulan untuk kebersihan di Depo Pemasaran Ikan agar ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya kebersihan di Depo Pemasaran Ikan masih belum terlaksana sepenuhnya.

1.2 Pengawasan

Pengawasan Di Depo Pemasaran belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak para pedagang yang nakal berjualan di luar area yang disediakan oleh Depo Pemasaran Ikan. Para pegawai Depo Pemasaran Ikan hanya datang untuk menarik retribusi pelelangan, menarik retribusi sewa tempat dagang dan menarik retribusi kebersihan. Tetapi dalam kenyataannya masih belum terjaganya kebersihan di Depo Pemasaran Ikan, masih adanya para pelelang yang tidak melelangkan ikan di Borg yang disediakan oleh Depo Pemasaran Ikan. Untuk pengawasan mutu tidak adanya para pegawai Depo Pemasaran Ikan yang datang untuk mengawasi mutu ikan.

1.3 Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan pemerintah sudah melakukan pengarahan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan pedagang Depo Pemasaran Ikan. Tetapi banyak para pedagang yang berjualan di luar Depo Pemasaran Ikan. Padahal para pegawai

Depo Pemasaran Ikan dalam memberikan pengarahan sudah tegas. Tetapi dalam kenyataannya para pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan belum pernah mendapatkan pengarahan dari pegawai, dalam penanganan para pedagang yang nakal para pegawai hanya dengan teguran yang tidak membuat efek jera. Untuk pengarahan kebersihan para pegawai Depo Pemasaran Ikan hanya mengambil retribusinya saja, sehingga pedaganglah yang mempunyai inisiatif untuk menjaga kebersihan Depo Pemasaran Ikan. Untuk kehegginisan ikan para pedagang ikan belum pernah merasakan penyuluhan, sehingga para pedagang menggunakan alat seadanya dan sepengetahuan para pedagang ikan untuk memperkirakan seberapa higienis dan layak ikan yang dijual.

1.4 Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan, belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan Pemimpin Depo Pemasaran Ikan tidak berani mengambil keputusan sebelum adanya persetujuan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu pengambilan keputusan banyak yang tidak seperti diharapkan oleh pedagang dan pengambilan keputusan pemimpin Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo terkesan otoriter.

2. Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

2.1 Depo Pemasaran Ikan

Sebagai keinginan pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo salah satu pusat pemasaran ikan di Jawa Timur maka di bangun Depo Pemasaran Ikan yang berdiri di lahan 3,8 Hektar. Mempunyai fasilitas area parkir 500m². Borg ikan sebanyak 17 dan area pasar ikan segar. Dalam Depo Pemasaran Ikan sudah optimal sebagai karena mempunyai fasilitas lahan parkir dan bangunan yang memadai untuk melakukan transaksi antara pengusaha, pelelang dan petani ikan. Untuk prosedur pelelangan ikan di Depo Pemasaran Ikan sangat mudah. Dikarenakan ikan masuk di Depo Pemasaran Ikan langsung akan dilakukan pelelangan untuk membuat kesepakatan harga antara pengusaha dan pelelang, pemerintah mengambil retribusi 5% dari harga yang disepakati oleh pengusaha dan pelelang.

2.2 Organisasi dan Pembagian Tugas dalam Depo Pemasaran Ikan

1.2.1 Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan

Untuk organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan sangatlah sederhana, dikarenakan organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan mempunyai delapan pegawai. Organisasi dalam Depo Pemasaran Ikan tidak menyulitkan pada pedagang untuk mengenal para pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pemasaran Ikan.

1.2.2 Pembagian Tugas dalam Depo Pemasaran Ikan

Untuk pembagian Tugas dalam Depo Pemasaran Ikan sudah jelas seperti yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 47 Tahun 2008, tentang pembagian

tugas dalam mengatur Depo Pemasaran Ikan sesuai peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan pembagian tugas dalam Depo Pemasaran Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan menugaskan pegawai UPTD Depo Pemasaran Ikan untuk mengatur dan menertibkan tempat transaksi, melaksanakan pelelangan ikan, melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retibusi di Depo Pemasaran Ikan, memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di Depo Pemasaran Ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak, mengawasi dan mengendalikan kualitas ikan di Depo Pemasaran Ikan, memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen atau pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Tetapi dalam pelaksanaannya para petugas kurang memaksimalkan tugas yang seharusnya dilaksanakan. Dikarenakan masih adanya para pedagang yang berjualan di luar area yang disediakan, dalam kebersihan masih belum terlaksana dengan baik, untuk memelihara fasilitas-fasilitas yang ada masih adanya bangunan yang tidak layak atau masih bocor saat hujan tiba. Dalam memberikan pembinaan, para pedagang belum pernah merasakan pembinaan dari pegawai Depo Pemasaran Ikan.

2.3 Optimalisasi yang dilakukan

a) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Depo Pemasaran Ikan sudah mencukupi kebutuhan para pedagang dalam luas bangunan, tempat pelelangan, tempat parkir. Untuk luas bangunan, Depo Pemasaran Ikan mempunyai luas bangunan sebesar 3,8 hektar dan

mempunyai bangunan yang sangat banyak. Akan tetapi banyak bangunan yang menganggur atau terbengkalai tidak terawat, dikarenakan tempat bangunannya terlalu kedalam sehingga para pedagang ikan takut tidak laku ikan yang dijualnya karena kalah dengan pedagang yang berjualan di bangunan area depan. Untuk tempat parkir mempunyai luas 500m^2 sehingga pengusaha dapat memarkirkan kendaraannya dengan leluasa. Tetapi masih ada kekurangan dalam sarana dan prasarana adalah transportasi umum untuk konsumen pedagang kecil dan tempat penyimpanan ikan. Untuk transportasi umum sangat perlu, dikarenakan jarak antara pemukiman dengan Depo Pemasaran Ikan lumayan jauh sehingga konsumen lebih memilih membeli ikan di toko merancang di dekat rumah dari pada membeli ikan di Depo Pemasaran Ikan. Untuk tempat penyimpanan ikan kurang luas dikarenakan renovasi. Renovasi bangunan untuk memperbanyak pedagang ikan tetapi memperkecil bangunan untuk menyimpa ikan para pedagang.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Depo Pemasaran Ikan masih kurang, dikarenakan masih banyak para pedagang tidak mengetahui bagaimana cara menjaga mutu ikan dan kebersihan ikan. Disebabkan pemerintah belum memberikan pelatihan atau penyuluhan tentang menjaga mutu ikan dan kebersihan ikan. Jadi para pedagang dalam menjaga mutu ikan dan kebersihan ikan hanya dengan sepengetahuannya untuk menjaga mutu ikan dan kebersihan ikan.

Dalam Sumber Daya Manusia petugas parkir masih kurang maksimal, dikarenakan yang mengelola parkir pihak Depo Pemasaran Ikan mengambil Sumber Daya Manusia dari desa Rangkah Kidul yang bertepatan daerah Depo Pemasaran Ikan Juga. Petugas parkir di Depo Pemasaran Ikan untuk menertibkan dan penataan parkir kurang rapi, sehingga terlihat sangat penuh padahal didalamnya masih ada lahan kosong yang bisa untuk merapikan kendaraan yang parkir di Depo Pemasaran Ikan.

Dalam Sumber Daya Manusia untuk pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan masih kurang dalam memanfaatkan bangunan - bangunan yang ada di Depo Pemasaran Ikan. Para pedagang di Depo Pemasaran Ikan merasa kurang strategis yang tempatnya agak masuk kedalam, menurut sepengetahuan para pedagang ikan bila menempati bangunan yang tempatnya agak masuk ke dalam akan membuat para konsumen jauh untuk menjangkaunya. Tetapi menurut para pegawai kalau berjualan di area Depo Pemasaran Ikan pasti konsumen akan mencari pedagang yang menjual ikan dengan mutu yang baik, kebersihan yang terjaga dan harga yang bersaing.

c) Pemasaran

Pihak Depo Pemasaran Ikan membuat kolam pancing ikan yang bertujuan untuk menarik konsumen agar datang di Depo Pemasaran Ikan, selain untuk membeli ikan para konsumen bisa memancing. tetapi dalam faktanya kurang optimal dengan membuat kolam pancing, dikarenakan meskipun sudah ada kolam pancing konsumen belum mengalami peningkatan dari hari ke hari melainkan di hari sabtu, minggu dan

hari libur. Depo Pemasaran Ikan untuk pemasaran masih kurangnya promosi. Dikarenakan untuk mendatangkan konsumen, oleh karena itu pedagang menginginkan pemerintah mempunyai peran untuk mempromosikan Depo pemasaran Ikan untuk mengenalkan kepada masyarakat atau konsumen datang ke Depo Pemasaran Ikan. Salah satu cara promosi yang diinginkan para pedagang ikan di Depo Pemasaran Ikan adalah pembuatan event-event untuk meramaikan Depo Pemasaran Ikan, dari event-event tersebut akan menarik para konsumen untuk datang ke Depo Pemasaran Ikan.

Para pedagang juga menginginkan adanya pedagang sayur, pedagang rempah - rempah dan pedagang daging di Depo Pemasaran Ikan. Dengan adanya pedagang - pedagang tersebut akan membuat konsumen datang ke Depo Pemasaran Ikan tidak hanya membeli ikan segar, tetapi masyarakat bisa membeli aneka kebutuhan konsumen yang lain, seperti membeli daging, sayur dan rempah - rempah.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

3.1 Faktor penghambat dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

a. Tidak adanya transportasi umum

Berdasarkan pengamatan dan wawancara faktor penghambat yang paling vital dalam Depo Pemasaran Ikan adalah tidak adanya transportasi umum yang menjangkau Depo Pemasaran Ikan. Dalam menjalankan usaha perikanan transportasi

adalah salah satu faktor yang mendukung untuk berjalannya usaha perikanan. Apabila tidak adanya transportasi umum, maka para konsumen akan lebih memilih membeli ikan di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Apabila memaksa untuk membeli ikan di Depo Pemasaran Ikan konsumen akan lebih banyak pengeluaran untuk transportasi, dikarenakan transportasi yang menjangkau Depo Pemasaran Ikan adalah alat transportasi yang tidak mempunyai trayek yang tetap, seperti becak, ojek dan taxi.

b. Kurangnya promosi

Berdasarkan pengamatan dan wawancara faktor penghambat untuk optimalnya Depo Pemasaran Ikan adalah kurangnya promosi. Dikarenakan promosi merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan usaha perikanan. Dalam pihak Depo Pemasaran Ikan belum adanya promosi untuk mengenalkan Depo Pemasaran Ikan kepada masyarakat atau konsumen.

3.2 Faktor pendukung dalam optimalisasi Depo Pemasaran Ikan guna menjalankan usaha perikanan

a. Air

Salah satu faktor pendukung di Depo Pemasaran Ikan tersedianya stok air yang melimpah. Air merupakan faktor terpenting dalam menjalankan usaha perikanan. Dikarenakan air adalah salah satu faktor untuk menjaga kesegaran dan kebersihan ikan, oleh karena itu air sangat dibutuhkan oleh para pedagang.

b. Area parkir yang luas dan bangunan pelelangan yang besar

Salah satu faktor pendukung di Depo Pemasaran Ikan tersedianya fasilitas area parkir yang luas dan bangunan pelelangan yang besar. Area parkir yang luas digunakan untuk para konsumen dapat memarkirkan kendaraannya tanpa ada perasaan khawatir tidak mendapatkan parkir. Untuk bangunan pelelangan yang besar berperan penting untuk para petani ikan dan pengusaha untuk tidak berdesak-desakan.

